



**PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 641 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
12. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025.
15. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/121/HK/437.12/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025;

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Uraian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 3

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025;

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik
Pada tanggal : 31 Juli 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK



NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si.

Lembina Utama Muda

NIP. 19700105 199003 1 008

RENJA TAHUN 2025



**BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK
KABUPATEN GRESIK**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang kemudian diperjelas kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kabupaten Gresik. Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Gresik maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga dari RPD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, mempertimbangkan prioritas pembangunan.

Memperhitungkan kemajuan pembangunan (hasil capaian kinerja) Kabupaten Gresik tahun sebelumnya, memperhatikan hasil analisis isu strategis, serta mengacu pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 serta RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik ini diharapkan dapat berguna secara optimal sehingga rencana hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan optimal pula dan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Gresik

Gresik, 31 Juli 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**



NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700105 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	42
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Pemerintah Kabupaten ...	46
4.2 Prioritas Perangkat Daerah	46
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan	48
BAB V : PENUTUP	49
5.1 Catatan Penting	49
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	49
5.3 Rencana Tindak Lanjut	50

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rancangan rencana kerja tersebut mengacu pada perencanaan dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga Renja harus tetap mengacu pada kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku dan berpedoman pada Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik memuat kebijakan publik dan arah kebijakan dalam mencapai target melalui rencana, program, dan penganggaran tahunan yang telah ditentukan. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, RPJMD, RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Renja sendiri memiliki fungsi sebagai dasar pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra PD serta merupakan bahan pertimbangan untuk tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Rencana Kerja yang disusun juga tidak mengesampingkan keterkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah tingkat provinsi dan tingkat pusat. Di harapkan penyusunan Rencana Kerja mampu memuat kebijakan publik dan arah pembangunan selama setahun serta dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen dan mampu menjadi panduan dasar dalam meningkatkan laju pengembangan pembangunan yang harus dilaksanakan secara konsisten, berimbang, tepat sasaran dan berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
19. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 2021 tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2021-2026.
20. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten gresik Tahun 2025.

22. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/121/HK/437.12/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025;

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) bertujuan sebagai rumusan program, dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung prioritas Pemerintah Kabupaten
- 4.2 Prioritas Perangkat Daerah
- 4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V. PENUTUP

5.1 Catatan Penting

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Pada tahun 2023, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 1 tahun dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun 2023 dan APBD Kabupaten Gresik. Evaluasi ini ditujukan sebagai bahan penyusunan terhadap Renja yang akan datang.

Plafon anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2025 yaitu Rp. 15.621.407.054.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan (tahun 2024).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel TC.29 sebagai berikut:

Tabel TC.29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Gresik

Perangkat Daerah : BAKESBANGPOL										
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
1	2	3	4	5	Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun	55 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	11 laporan	11 laporan	100%
8.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan perangkat adaerah yang terbayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum perangkat Daerah yang di sediakan	220 Jenis 5 Tahun 60 Jenis 15 Jenis 5 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	100% 100% 100% 100% 100%	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	100% 100% 100% 100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan	30 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	6 Orang	6 Orang	100%
8.1.1.2.09	Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Unit 10 Unit 140 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	100% 100% 100%	1 Unit 2 Unit 28 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	100% 100% 100%
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase potensi konflikterkait tpoleksosbud yang dihindakanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.2.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	61 Kali 40 Kali	14 Kali 8 Kali	14 Kali 8 Kali	14 Kali 8 Kali	100% 100%	5 Kali 8 Kali	5 Kali 8 Kali	100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGANETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi politik Masyarakat dalam Berdemokrasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	5 Tahun 40 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	100% 100%	1 Tahun 8 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASANORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi KemasyarakatanYang Berkinerja Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.4.2.01	Perumusan KebijakanTeknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta, program kerja, kebijakan dan money kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	250 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	100%	50 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
1	2	3	4	5	Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.1.5.2.01	Perumusan KebijakanTeknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pesertayang mengikutiKegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	55 Kali 10 Kali 55 Kali	11 Kali 2 Kali 11 Kali	11 Kali 2 Kali 11 Kali	11 Kali 2 Kali 11 Kali	100% 100% 100%	11 Kali 2 Kali 11 Kali	11 Kali 2 Kali 11 Kali	100% 100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase konflik sosial yang di selesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.6.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	15 Kali 60 Kali 60 Kali 55 Kali 55 Kali	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali	100% 100% 100% 100% 100%	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali	100% 100% 100% 100% 100%

Tabel Realisasi Program Kegiatan Tahun 2023

N o	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIS ASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%
2	Program Penguatan Ideologi PancasilaDan Karakter Kebangsaan	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan PolitikDan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Ketercapaian Target Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%
4	Program Pemberdayaan Dan PengawasanOrganisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	100%	100%	100%
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,Dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik maka sebagaimana tercantum pada BAB IV Pasal 4, mempunyai tugas :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”

Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, socsal dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Perubahan sistem pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dalam konteks mewujudkannya diharapkan peranan perencanaan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan kegiatan.

Tugas Pemerintahan Umum dan Politik adalah tugas yang tidak dilaksanakan Pemerintah pusat (kewenangan Absolut : (1) Politik Luar Negeri (2) Pertahanan (3) Keamanan (4) Hukum (5) Agama (6) Moneter/Keuangan) bukan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan, yang diantaranya :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demikrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Tabel T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor kesbangpol Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025(thn n)	Tahun2026 (thn n+1)	Tahun2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kesalehan Sosial	-		67,21	69,42	71,16	74	76,95	79,16	69,42	71,16	
2.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Target Partisipasi Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Teraftar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

5	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tingkat kondusifitas wilayah kabupaten Gresik. Dalam pencapaian kinerja, pengukuran tingkat keberhasilan dapat diukur melalui program yang telah dilaksanakan dan direncanakan.

Kegiatan evaluasi perencanaan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam melakukan perencanaan pada masa mendatang. Sebagai bagian perencanaan yang memiliki fungsi dasar dalam manajemen dengan tujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan.

Evaluasi terhadap perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efisiensi dan efektifitas.

Isu - isu Strategis Bakesbangpol

Identifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi dan peran Bakesbangpol sebagai berikut :

1. Masih adanya potensi Kerawanan Konflik SARA
2. Masih banyak Ormas dan LSM yang belum berbadan Hukum
3. Kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Umum
4. Kurangnya Komunikasi antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
5. Kurangnya pemahaman kelompok masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara
6. Kurangnya lembaga keagamaan berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama

Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Menilik dari hasil pengevaluasian dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik maka diharapkan dalam jangka waktu yang singkat dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan kualitas yang sangat menunjang peningkatan kompetensi dan penjaminan terhadap mutu pembangunan dan sebagai wadah aspirasi masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal yang tersusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Dokumen rencana kinerja mencakup juga informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC.31 dibawah ini.

Tabel T.C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bakesbangpol

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bakesbangpol	Nilai Kapasitas Internal Organisasi	87	4.222.778.220	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bakesbangpol	Nilai Kapasitas Internal Organisasi	87	4.295.094.920	
2	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Persentase Kebutuhan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	100	276.928.043	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Persentase Kebutuhan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	100	45.007.394	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 3	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Bakesbangpol	4 Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan	5 100	6 3.362.440.766	7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Bakesbangpol	9 Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan	10 100	11 3.362.440.766	12
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	290.042.413	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	438.457.572	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Persentase jasa fasilitas sarana dan prasarana aparaturn	100	171.972.000	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Persentase jasa fasilitas sarana dan prasarana aparaturn	100	180.972.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Persentase fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	100	121.394.998	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Persentase fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	100	268.217.188	
7	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpol	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	1.834.974.856	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpol	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	2.074.218.621	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5	1.834.974.856	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.074.218.621	
9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	100	844.088.506	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	100	6.101.110.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang, Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	5	844.088.506	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	10	6.101.110.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar	100	277.981.226	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar	100	384.834.050	
11											

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Persentase Pembinaan LSM, OXP, Tomas, Orsospol & Toga	100	277.981.226	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Persentase Pembinaan LSM, OXP, Tomas, Orsospol & Toga	100	384.834.050	
13	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	881.006.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	943.199.883	
14	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	881.006.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	943.199.883	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100	1.468.462.600	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100	1.822.949.580	
18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD		1.468.462.600	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD		1.822.949.580	
JUMLAH					9.529.291.408	JUMLAH				15.621.407.054	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Selaku Badan yang memiliki Tanggung Jawab dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya melalui program dan kegiatan yang direncanakan adalah:

No	Program
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

No	Program/kegiatan /sub kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No	Program/kegiatan /sub kegiatan
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Tabel T.C.32.
Usulan Program dan kegiatan Para Pemangku Kepentingan tahun 2025
Kabupaten Gresik

NO	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bakesbangpol	Prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	4.295.094.920,00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	45.007.394,00	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bakesbangpol	jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayar	3.362.440.766,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Administrasi Umum perangkat Daerah yang di sediakan	438.457.572,00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan	180.972.000,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	268.217.188,00	

NO	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
9	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpol	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.074.218.621,00	
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.074.218.621,00	
11	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAIPOLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Persentase Ketercapaian Target Partisipasi Masyarakat	6.101.110.000,00	
12	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol	Persentase Partisipasi Masyarakat	6.101.110.000,00	
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	384.834.050,00	

NO	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
14	Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	384.834.050,00	
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	943.199.883,00	
16	Perumusan kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	943.199.883,00	
17	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAANNASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	1.822.949.580,00	
18	Perumusan Kebijakan Teknis dan PelaksanaanPemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	1.822.949.540,00	
JUMLAH				15.621.407.054,00	

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam upaya Menciptakan bentuk sinkronisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka diharapkan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik merupakan implementasi dari program nasional yang bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, adapun kegiatan secara nasional dilaksanakan melalui melalui 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

Sehingga diharapkan pada akhirnya program/kegiatan/sub kegiatan yang berjalan mampu bereperan secara totalitas terhadap index pembangunan manusia di Kabupaten Gresik dan tepat sasaran. Hal ini kemudian menjadi dasar penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi:

- a. Merumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Mengadakan Pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
- c. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela Negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama ;
- d. Melaksanakan pembinaan pembauran bangsa serta pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan/ atau LSM asing ;
- e. Melakukan pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah

dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- f. Memfasilitasi pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Mengadakan suatu perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran terhadap penyusunan Rencana Kerja Tahunan mengacu pada rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan, dimana penjelasan dan deskripsi terhadap renja telah ditetapkan melalui evaluasi, monitoring dan pengawasan kegiatan serta mempertimbangkan terhadap alokasi dan kemampuan sumber daya organisasi dalam mendukung kegiatan atau operasionalnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari pemerintahan daerah dan memiliki mempunyai tujuan menurunnya konflik.

Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penetapan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan;
- b. Terwujudnya Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- c. Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Selanjutnya masing-masing sasaran ditetapkan kebijaksanaan dan pada masing-masing kebijaksanaan ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait dan berjalan secara efektif dan efisien.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sebagai *"fasilitator"* setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

- a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan :
 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
 2. Pencapaian SDGs;
 3. Pengentasan Kemiskinan
 4. Pencapaian NSPK dan SPM
 5. Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di masyarakat;
 6. Peningkatan tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan Kabupaten Gresik;
 7. Pengawasan dan pemeliharaan kondusifitas wilayah kabupaten gresik;
 8. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (outcome).
- b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan antara lain meliputi :
 1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Gresik pada Tahun 2025, Jumlah Program sebanyak 6 program dan Jumlah Kegiatan sebanyak 12 kegiatan, yaitu sebagai berikut :

No	Program/kegiatan /sub kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025, untuk total pagu yang diusulkan **Rp. 15.621.407.054,00**

- c. Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja OPD

Program dan Kegiatan yang dirancang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2025 terdiri dari :

Program Utama

1. *Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan rasa aman dalam Pencegahan dan penanganan konflik dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Gresik.

2. *Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pengembangan Etika Politik*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan Ormas dalam berdemokrasi yang jujur, adil dan beretika.

3. *Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kerukunan dan pembauran*

Program ini bertujuan untuk lebih meratakan dan mensosialisasi secara luas mengenai wawasan kebangsaan, kerukunan dan pembauran dengan menggandeng Ormas, Orpol, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025, berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang diemban.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung prioritas Pemerintah Kabupaten

Memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 maka dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yaitu penyelenggara pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tidak secara langsung mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Gresik namun dalam berperan penting dalam kaitan pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Gresik dimaksud. Disamping itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik juga memegang peranan penting dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 untuk mendukung prioritas pemerintah Kabupaten ada 2 kegiatan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 dijabarkan pada table berikut :

Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

Tahun 2025

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Keterangan
Pembentukan Paskibraka Duta Pancasila	150 Orang	Gresik	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	892.582.361	
			8.01.02.2.01			
			8.01.02.2.01.0004			
Fasilitasi FORKOMPIMDA	12 Dokumen	Gresik	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	676.026.200	
			8.01.06.2.01			
			8.01.06.2.01.0006			

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025. Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
2. Pelaksanaan kebijakan ;
3. Pelaksanaan koordinasi ;
4. Pelaksanaan fasilitasi FORKOMPIMDA Kabupaten
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indicator kinerja (outcome)/kegiatan (outout) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Gresik (terlampir)

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang bersandar pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang, bagian, dan seluruh staff/aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

- a) Melaksanakan Renja 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan ;
 - b) Menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain: program/kegiatan/Sub Kegiatan, indikator dan target.
2. Dalam Rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang dilaksanakan secara triwulan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Gresik Tahun 2025 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

Gresik, 31 Juli 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**



NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700105 199003 1 008

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	234.479.000,00	Kab. Gresik, Kabomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P5 - Pembedaan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesehatan Sosial, Budi Pewarisan Luhur dan Berintegrasi a Penguatan kebudayaan berbasis kearifan Gresik yang agamis	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	R.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	37.106.050,00	Kab. Gresik, Kabombas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P5 - Pembedaan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesehatan Sosial, Budi Pewarisan Luhur dan Berintegrasi a Penguatan kebudayaan berbasis kearifan Gresik yang agamis	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Persewang Urusan Pemerintahan Desaan		-			-	180.972.000,00			-	PS - Pemba ngunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesejahteraan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegrasi a. Penguatan kehidupan budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	0.01.01.2.00.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 Laporan	180.872.000,00	Kab. Gresik, Kabomas, Dahurejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PS - Pemba ngunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesejahteraan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegrasi a. Penguatan kehidupan budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Segram Kebangsaan				10195 Orang	728.307.826,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dehanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PS - Peningkatan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kasejahteraan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	0.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Segram Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Segram Kebangsaan	454 Orang				1.347.910.995,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dehanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PS - Peningkatan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kasejahteraan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2	8.01.00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-				8.101.110.000,00						-	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGENDAIAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kegiatan di Bidang Keragaman Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Penyelenggaraan Naskah, Fasilitas Keragaman Umat Beragama dan Penghayat Kepemasyarakatan di Daerah				300 Orang	808.200.000,00	Kab. Gresik, Kobernas, Dehaharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PS - Penguatan kehidupan masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesejahteraan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berkeadilan a Penguatan kehidupan budaya berbasis kearifan lokal Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Keragaman Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Penyelenggaraan Naskah, Fasilitas Keragaman Umat Beragama dan Penghayat Kepemasyarakatan di Daerah																	
	8.01.06.2.01.0004		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Keragaman Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Penyelenggaraan Naskah, Fasilitas Keragaman Umat Beragama dan Penghayat Kepemasyarakatan di Daerah				384 Orang	104.899.903,00	Kab. Gresik, Kobernas, Semua Kot/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PS - Penguatan kehidupan masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesejahteraan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berkeadilan a Penguatan kehidupan budaya berbasis kearifan lokal Gresik yang agamis			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEMASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-					1.822.848.580,00							0,00		

[illegible]

[illegible]

